

Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Sumatera Utara

Adriansyah Hidayat

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Yafiz

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis:

adriansyahhidayat08@gmail.com

Abstrak. Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Laju investasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara karena investasi mendorong negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan investasi juga mempunyai peran positif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi bergantung pada tabungan dan investasi yang tinggi, jika tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara juga akan rendah. Untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi atau tujuan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) itu sendiri maka diperlukan suatu rencana kerja strategis promosi yang tepat untuk dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, sehingga investasi di Sumatera Utara meningkat. Berbagai kegiatan belum memberi dampak yang signifikan dalam meningkatkan investasi, meningkatnya kegiatan promosi yang dilakukan tidak seiring dengan meningkatnya nilai investasi Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa strategi subjektif ekspresif kualitatif, berupa informasi spesifik dalam kerangka kata-kata yang sesuai dengan ciri-ciri pendekatan subjektif. Kualitatif adalah mengumpulkan informasi penting dan tambahan melalui persepsi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan strategi investasi, meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan, serta melaksanakan kegiatan promosi investasi secara komprehensif (seperti mengadakan seminar dan pertemuan forum investasi) di dalam dan luar negeri. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung pengembangan investasi daerah. Pesebaran Penanaman Modal ;Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi; Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment)Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK); Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan Promosi Penanaman Modal. Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Kata Kunci : Strategi Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Investasi, Investasi.

Abstract. Investment is a benchmark for whether a country can be said to have a good or low level of economic growth. The rate of investment affects the level of state welfare because investment encourages the state to create production to fulfill state affairs and the nation's welfare. Investment policy also has a positive role in reducing poverty and unemployment, because economic growth depends on high savings and investment. If savings and investment are low then the economic growth

Received Agustus 30, 2023; Revised September 12, 2023; Accepted Oktober 07, 2023

* Adriansyah Hidayat, adriansyahhidayat08@gmail.com

of society and the country will also be low. To achieve the goal of realizing the vision and mission or objectives of the One Stop Integrated Investment and Services Agency (DPMPTSP) itself, an appropriate promotional strategic work plan is needed to be considered by the regional government, so that investment in North Sumatra increases. Various activities have not had a significant impact in increasing investment, the increase in promotional activities carried out is not in line with the increase in investment value. The research technique used in this research can be a subjective expressive qualitative strategy, in the form of specific information in terms of words that match the characteristics subjective approach. Qualitative is collecting important and additional information through perception, interviews and documentation. The results of this research show that the North Sumatra Provincial Government has implemented an investment strategy, improved the quality and skills of the community through training, and carried out comprehensive investment promotion activities (such as holding seminars and investment forum meetings) at home and abroad. Accelerate infrastructure development and support regional investment development. Distribution of Capital Investment; Focus on Food, Infrastructure and Energy Development; Environmentally sound investment (green investment) Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK); Providing facilities, convenience and investment incentives; and Investment Promotion. A conducive and competitive investment climate.

Keywords: *Investment Strategy, Integrated Services and Investment, Investment.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada hakekatnya pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat dan tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.

Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan kewewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan dimulai dari proses tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara memiliki jenis perizinan seperti SIUP (surat izin usaha perdagangan) untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Hal tersebut termasuk dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013. Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, yang menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perusahaan perdagangan untuk memulai usaha, perlu mempersingkat pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Paradigma pelayanan terpadu satu pintu yang dinilai lebih efektif dan efisien dari segi

waktu dan biaya, selama ini diterapkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pada pelaksanaan prosedur pelayanan penerbitan izin yang masih melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah berupaya meningkatkan standar pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Masyarakat selalu mengharapkan pelayanan publik yang berkualitas dari para birokrat, padahal harapan tersebut sering kali tidak terpenuhi karena secara historis, pelayanan publik sangat melelahkan, mahal, lamban, dan berbelit-belit. Hal seperti itu sering terjadi karena masyarakat masih mementingkan pihak yang melayani dibandingkan pihak yang dilayani. DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penerbitan izin di Sumatera Utara harus mempertimbangkan pelayanan perizinan. Penerapan layanan perizinan masih menemui sejumlah tantangan. Hal ini terjadi akibat adanya sejumlah tantangan yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya oleh penyedia layanan perizinan, sehingga menghambat pemberian layanan di DPMPTSP Sumatera Utara.

Hal inilah yang dapat penulis jadikan fokus dalam mengangkat judul “Efektifitas Pelayanan Pembuatan Perizinan Berusaha Pada Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (SIUP) Provinsi Sumatera Utara” berdasarkan uraian permasalahan yang diangkat diatas mengenai pelayanan pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara.

B. KAJIAN TEORI

Teori Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia*, yang artinya kepemimpinan dalam ketentaraan. Menurut Chandler (yang dikutip oleh Kusumadmo 2013), strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan perusahaan, dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Secara spesifik, strategi adalah status misi perusahaan, yang mendefinisikan tujuan organisasi dengan membatasi kekuatan eksternal dan internal. Mengembangkan strategi dan strategi tertentu untuk mencapai tujuan dan memastikan implementasi yang benar, sehingga tujuan utama organisasi dapat tercapai.

Strategi adalah pendekatan secara langsung terhadap ide, perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, dan temanya untuk menentukan faktor-faktor pendukung berdasarkan prinsip-prinsip

implementasi ide yang rasional, efisiensi pembiayaan dan strategi untuk mencapai tujuan secara efektif. (Fandi Tjiptono 2000:17).

Jenis-jenis Strategi Menurut Hari Suminto (2002: 20) ada 5 strategi, yaitu:

1. Strategi penetrasi pasar
2. Strategi pengembangan produk
3. Strategi pengembangan pasar
4. Strategi integrasi
5. Strategi diversifikasi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Pelayanan terpadu satu pintu (disingkat PTSP) adalah kegiatan pengelolaan izin dan non izin. Izin dan non izin adalah otorisasi dari organisasi yang berwenang. Proses pengelolaan organisasi dilakukan di satu tempat mulai dari tahap pengarsipan hingga tahap penerbitan. DPMPTSP bertanggung jawab membantu urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di daerah. Definisi ini tertuang dalam UU No. 25 tahun 16 2007 (UU Penanaman Modal).

Ketika dana pusat yang terbatas cenderung mengembangkan ekonomi daerah, menarik investasi daerah (domestik) dan asing menjadi pilihan. Untuk melakukan investasi, setiap daerah diharuskan melakukan dua hal, yaitu memperbaiki manajemen departemen yang bertanggung jawab atas kehadiran, kedatangan dan keberlanjutan investasi di daerah, serta menyusun daftar tipikal potensi lokal untuk investasi. Dijual kepada investor dalam atau luar negeri. Dengan mengacu pada analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan keunggulan) maka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat bekerja sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Tentu saja, ini membutuhkan perencanaan, bimbingan, dan integrasi yang sistematis.

Tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumatera Utara

Bidang Promosi Penanaman Modal merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota,

- RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
 - d. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi penanaman modal;
 - e. pengoordinasian penyusunan bahan pengembangan promosi penanaman modal;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Kota;
 - h. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - i. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - j. pelaksanaan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - k. pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal lingkup Kota;
 - l. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - m. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - n. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Promosi Penanaman Modal membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, dan Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal.

Investasi

Secara umum, menurut Sunariyah (2006: 32), investasi mengacu pada aset perusahaan atau individu atau penyertaan modal untuk memperoleh imbal hasil yang lebih besar dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan ini menyangkut banyak hal, di antaranya jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang

dikenal baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Investasi merupakan istilah populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable. Kedua istilah tersebut terjemahan bahasa Inggris dari kata Invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang berinvestasi. Menurut Kamaruddin, ia mengemukakan tiga alasan mengapa banyak orang berinvestasi, yaitu:

1. Jalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Orang bijak akan mempertimbangkan bagaimana meningkatkan standar hidup mereka dari waktu ke waktu, atau setidaknya bagaimana mengelola untuk mempertahankan tingkat pendapatan mereka saat ini sehingga tingkat pendapatan mereka di masa depan tidak akan menurun.
2. Mengurangi tekanan inflasi Inflasi merupakan suatu kondisi yang menyebabkan harga barang dan jasa naik akibat ketidakstabilan perekonomian suatu negara. Dengan berinvestasi pada suatu perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindari diri sendiri, jangan sampai nilai kekayaan atau propertinya turun, karena inflasi akan merusak nilainya.
3. Dorongan untuk menghemat pajak Berbagai negara di dunia telah menerapkan berbagai kebijakan yang mendorong tumbuhnya investasi sosial dengan memberikan fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang berinvestasi di bidang usaha tertentu. Selain itu, orang berinvestasi karena didorong oleh kebutuhan masa depan. Sayangnya, banyak orang belum memikirkan kebutuhan masa depan mereka. Bahkan di masa depan, biaya hidup seseorang pasti akan meningkat. Selain permintaan masa depan, investasi publik juga dipicu oleh banyak faktor yang tidak pasti dalam kehidupan atau kejadian tak terduga lainnya, seperti keterbatasan dana, kondisi kesehatan, bencana mendadak, dan kondisi pasar investasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam publikasi ini. Dalam penelitian kualitatif, informasi, justifikasi, dan temuan observasi adalah data yang dikumpulkan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai hasil observasi yang melandasi informasi pada saat interaksi di lapangan, maka hasil observasi dalam penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan ciri-ciri pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera". Peta Panduan(Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (Quick wins and Low Hanging Fruits), (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha dan Perdagangan, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala kecil, menengah dan besar, dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledgebased economy). Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera, Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:

- 1) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- 2) Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
- 3) Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Berdasarkan visi dan misi di atas, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuh elemen utama sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu: Perbaikan iklim penanaman modal; Pesebaran Penanaman Modal; Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi; Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK); Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan Promosi Penanaman Modal. Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing merupakan faktor daya tarik utama bagi para investor untuk

menanamkan modalnya di Kota Medan. Iklim investasi yang kondusif diperlukan untuk kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi, sedangkan daya saing daerah dibutuhkan agar para investor lebih tertarik berinvestasi di Kota Medan dibandingkan daerah-daerah lain yang memiliki potensiserupa.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan strategi investasi, meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan, serta melaksanakan kegiatan promosi investasi secara komprehensif (seperti mengadakan seminar dan pertemuan forum investasi) di dalam dan luar negeri. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung pengembangan investasi daerah. Pesebaran Penanaman Modal ;Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi; Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment)Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK); Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan Promosi Penanaman Modal.Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad,Kamaruddin, (2004), Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio, Jakarta: Rineka Cipta
- Fandy, Tjiptono, 2000. Manajemen Jasa, Edisi kedua.Andy offiset , Yogyakarta.
- Fatoni, Abdurrahman. 2009. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Tesis. Jakarta:PTRineka Cipta.
- Kusumadmo, E. 2013. Manajemen Strategik-Pengetahuan. Yogyakarta, Indonesia: Cahaya Atma Pustaka.
- Prasetyo, Eko, “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah periode 1985- 2009”, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Saputra, Rochmat Adi. 2021. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam Memberikan Pelayanan Perizinan. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung.
- Renstra 2021. Pemerintah Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai 2-3 Medan-2014
- Rexi, Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Sunariyah, 2006. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, edisi ke lima, UPPAMP YKPN, Yogyakarta.

- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suminto, Hari. (2002) Pemasaran Blak-blakan. Batam: Inter Aksara.
- Suryabrata, Sumadi. 2008. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Grafindo. Tjiptono, Fandy. 2008. Service Management: Mewujudkan Pelayanan Prima. Yogyakarta: Andi.
- Umar, Husein. 2014. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
1. Lumi, Bill. 2017. Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan). Jurnal Eksekutif, Vol 1, No. 1.
 2. Yudisthira, Angga, “Strategi Peningkatan Investasi Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Surabaya”, Skripsi, Universitas Negeri Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, 2019.